



NOTA KESEPAKATAN  
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
DENGAN  
PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT (PKPM) ACEH

---

---

Nomor: 3354/Un.08/Ps/HM.01/09/2020

Nomor: /PKPM/IX/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini :

**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA** *Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "**Pascasarjana UIN Ar-Raniry**" beralamat di Jl Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec Syiah Kuala Banda Aceh, Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Dr. Muslim Zainudin, M.Si**

*Jabatan Direktur Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "**Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh**" beralamat di Jl. Prada Utama Nomor 113, Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

### PASAL 1

#### Maksud dan Tujuan

- 1) Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk meningkatkan kolaborasi dan membangun sinergi berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sehingga dapat berdaya saing dan berkelanjutan.
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/atau referensi dasar dalam pelaksanaan kerjasama oleh PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam perbaikan tata kelola manajemen pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pengasuhan yang berkarakter disiplin positif, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas PARA PIHAK.

### PASAL 2

#### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- 1) Pengembangan tata kelola dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna meningkatkan pengelolaan dan manajemen bidang pendidikan;
- 2) Membangun kemitraan yang kuat bersama PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas dan

- pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 3) Pengembangan bidang perlindungan dan pengasuhan anak yang berkarakter (Pengasuhan Disiplin Positif) agar dapat melahirkan generasi yang bermartabat dan berakhlakul karimah;
  - 4) Pengembangan sumber daya masyarakat untuk partisipasi positif dalam program pembangunan secara berkelanjutan;
  - 5) Peningkatan kemampuan menulis, penelitian karya ilmiah dan literasi;

### **PASAL 3**

#### **Jangka Waktu**

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Nota Kesepakatan.

### **PASAL 4**

#### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, merupakan beban dan tanggung jawab serta ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK serta dari berbagai sumber lainnya yang tidak mengikat.

### **PASAL 5**

#### **Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **PASAL 6**

#### **Korespondensi dan Komunikasi**

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;

### **PASAL 7**

#### **Korespondensi dan Komunikasi**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini atau segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### **PASAL 8**

#### **Addendum**

Segala sesuatu mengenai Nota Kesepakatan ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 9**  
**Ketentuan Penutup**

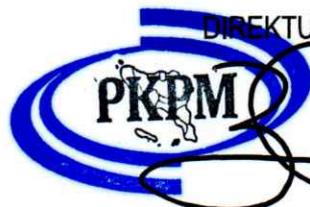
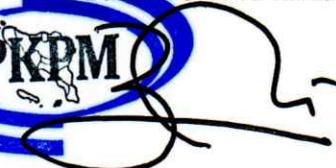
Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
  
Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

**PIHAK KEDUA**

  
DIREKTUR PKPM Aceh  
  
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si



**PROGRAM STRENGTHENING OF THE INTEGRATED  
CHILD SOCIAL WELFARE SERVICES/PUSAT  
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
(PKSAI) IN ACEH**

**KERJASAMA ANTARA  
PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT  
&  
UNICEF**

**TAHUN 2019-2020**

**LOKASI PROGRAM:**

- 1. PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
- 2. PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**
- 3. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**

## DOKUMENTASI KEGIATAN PKSAI







<p><b>Pembelajaran</b></p>	<p>Kebutuhan 3 daerah pilot, pada prinsipnya sama. Namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Banda Aceh misalnya terkesan belum terbiasa melakukan koordinasi internal (Dinas Sosial) dan lintas sector. Koordinasi lintas sector justru lebih banyak dilakukan Dinas P3AKB. Sehingga dibutuhkan penguatan internal dan integrasi sekaligus. Ditambah lagi Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi yang sering menjadi muara permasalahan sosial. Apalagi selama ini Banda Aceh selalu seperti mendapat dukungan penuh dari Propinsi karena banyak kasus di Banda Aceh yang ditangani oleh Propinsi.</p> <p>Aceh Barat, mulai sering melakukan pertemuan lintas sector sehingga PKSAI diharapkan lebih memperkuat sinergisasi yang mulai terbangun.</p> <p>Lhokseumawe, dengan kondisi kota yang kecil namun menampung banyak kasus dari kabupaten tetangga, mengharuskan koordinasi yang kuat, selain internal dan lintas sector juga lintas kabupaten.</p>
<p><b>Catatan Penting</b></p>	<p>Seluruh peserta dan lintas sector, masih menganggap bahwa PKSAI adalah kelembagaan baru. Padahal sebenarnya bukan kelembagaan baru. Sekretariat dan Tim yang dibentuk lebih merupakan upaya memperkuat program.</p>
<p><b>Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)</b></p>	<p>Lintas sector semua jenjang seperti Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal, dll.</p>
<p><b>Kendala/tantangan yang dihadapi</b></p>	<p>Kendala berarti tidak ditemui, hanya kendala terkait lokasi kegiatan yang sangat terbatas terutama di kabupaten/kota</p>
<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>Kegiatan terlaksana dengan baik namun masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk penguatan.</p>
<p><b>Rencana Tindak Lanjut</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pertemuan rutin lanjutan</li> <li>2. Konsultasi Draft SOP PKSAI</li> <li>3. Konsultasi Draft Action Plan</li> <li>4. Persiapan Regulasi yang diminta Kepala Daerah.</li> </ol>
	<p>Banda Aceh, Oktober 2020  Program Manager</p> <p>  DR. Mahmuddin</p>

**LAPORAN KEGIATAN PKSAI  
KEMENSOS – Dinsos Aceh – PKPM – UNICEF**

<b>Program/Project</b>	Strengthening Integrated Child Social Welfare Service/Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi (PKSAI) in Aceh.											
<b>OUT PUT</b>	2. Government of Aceh province has commitment to establish UK PKSAI Province and District / City PKSAI											
<b>Nama Kegiatan</b>	2.1. Regular Meeting Coordination at UK PKSAI/PKSAI <b>2.1.1. Regular Meeting Coordination UK PKSAI in Banda Aceh</b>											
<b>Indikator</b>	2.1. The availability of Decree of The Head of Department of Social Affairs of Aceh Province (Y/N) 2.2. The availability of monthly meeting as mechanism for cross-sectoral and integrated collaboration between UK PKSAI and all intervened district's PKSAIs											
<b>Nomor Acuan Pengiriman Dana</b>	- PCA Ref. No. 2016/33/CP/PKPM - PD Ref. No. 2016/33/CP/PKPM/168											
<b>Jumlah Anggaran Terpakai</b>	Rp. 22.600.000.-											
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	1. Terjalannya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Penyusunan Draft Rencana Aksi dan SOP startegis pengembangan program PKSAI.											
<b>Output/Keluaran</b>	1. Terbangunnya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Tersususnya Draft Rencana Aksi dan SOP strategis pengembangan program PKSAI.											
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat)</b>  <b>Jumlah Peserta (Laki-laki dan Perempuan)</b>	<b>Reg Meet 1</b> Hari/Tanggal : Jum'at/25 September 2020 Pukul : 14.00 sampai selesai Lokasi : Ruang Rapat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh Peserta : Lintas sector Perlindungan Anak dan Media Massa/Online  <table border="1" data-bbox="443 1630 1281 1825"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Peserta</th> </tr> <tr> <th>Laki-laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Regular Meeting 1</b></td> <td>24</td> <td>13</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>	Kegiatan	Peserta			Laki-laki	Perempuan	Total	<b>Regular Meeting 1</b>	24	13	37
Kegiatan	Peserta											
	Laki-laki	Perempuan	Total									
<b>Regular Meeting 1</b>	24	13	37									

<b>Pembelajaran</b>	<p>Kebutuhan 3 daerah pilot, pada prinsipnya sama. Namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Banda Aceh misalnya terkesan belum terbiasa melakukan koordinasi internal (Dinas Sosial) dan lintas sector. Koordinasi lintas sector justru lebih banyak dilakukan Dinas P3AKB. Sehingga dibutuhkan penguatan internal dan integrasi sekaligus. Ditambah lagi Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi yang sering menjadi muara permasalahan sosial. Apalagi selama ini Banda Aceh selalu seperti mendapat dukungan penuh dari Propinsi karena banyak kasus di Banda Aceh yang ditangani oleh Propinsi.</p> <p>Aceh Barat, mulai sering melakukan pertemuan lintas sector sehingga PKSAl diharapkan lebih memperkuat sinergisasi yang mulai terbangun.</p> <p>Lhokseumawe, dengan kondisi kota yang kecil namun menampung banyak kasus dari kabupaten tetangga, mengharuskan koordinasi yang kuat, selain internal dan lintas sector juga lintas kabupaten.</p>
<b>Catatan Penting</b>	<p>Seluruh peserta dan lintas sector, masih menganggap bahwa PKSAl adalah kelembagaan baru. Padahal sebenarnya bukan kelembagaan baru. Sekretariat dan Tim yang dibentuk lebih merupakan upaya memperkuat program.</p>
<b>Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)</b>	<p>Lintas sector semua jenjang seperti Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal, dll.</p>
<b>Kendala/tantangan yang dihadapi</b>	<p>Kendala berarti tidak ditemui, hanya kendala terkait lokasi kegiatan yang sangat terbatas terutama di kabupaten/kota</p>
<b>Kesimpulan</b>	<p>Kegiatan terlaksana dengan baik namun masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk penguatan.</p>
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pertemuan rutin lanjutan</li> <li>2. Konsultasi Draft SOP PKSAl</li> <li>3. Konsultasi Draft Action Plan</li> <li>4. Persiapan Regulasi yang diminta Kepala Daerah.</li> </ol>
	<p>Banda Aceh, Oktober 2020  Program Manager    DR. Mahmuddin</p>

**LAPORAN KEGIATAN PKSAI  
KEMENSOS – Dinsos Aceh – PKPM – UNICEF**

<b>Program/Project</b>	Strengthening Integrated Child Social Welfare Service/Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi (PKSAI) in Aceh.											
<b>OUT PUT</b>	2. Government of Aceh province has commitment to establish UK PKSAI Province and District / City PKSAI											
<b>Nama Kegiatan</b>	2.1. Regular Meeting Coordination at UK PKSAI/PKSAI <b>2.1.2. Regular Meeting Coordination PKSAI, in 3 Districts (ACEH BARAT)</b>											
<b>Indikator</b>	2.1. The availability of Decree of The Head of Department of Social Affairs of Aceh Province (Y/N) 2.2. The availability of monthly meeting as mechanism for cross-sectoral and integrated collaboration between UK PKSAI and all intervened district's PKSAIs											
<b>Nomor Acuan Pengiriman Dana</b>	- PCA Ref. No. 2019/33/CP/PKPM - PD Ref. No. 2019/33/CP/PKPM/168											
<b>Jumlah Anggaran Terpakai</b>	Rp. 32.650.000.-											
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	1. Terjalannya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Penyusunan Draft Rencana Aksi dan SOP startegis pengembangan program PKSAI.											
<b>Output/Keluaran</b>	1. Terbangunnya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Tersusunnya Draft Rencana Aksi dan SOP strategis pengembangan program PKSAI.											
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat)</b>  <b>Jumlah Peserta (Laki-laki dan Perempuan)</b>	<p><b>ACEH BARAT</b> <b>Reg Meet 1</b> Hari/Tanggal. Selasa, 13 Rabu 2020 Pukul : 9.30 s.d selesai Lokasi : Aula Dinsos Aceh Barat Peserta : Lintas sector: DinSos, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil,Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Peserta</th> </tr> <tr> <th>Laki-laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Regular Meeting 1 Aceh Barat</b></td> <td>24</td> <td>13</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>	Kegiatan	Peserta			Laki-laki	Perempuan	Total	<b>Regular Meeting 1 Aceh Barat</b>	24	13	37
Kegiatan	Peserta											
	Laki-laki	Perempuan	Total									
<b>Regular Meeting 1 Aceh Barat</b>	24	13	37									

<b>Proses Kegiatan</b>	<b>Regular Meeting 1</b>
<b>Pembelajaran</b>	<p>Kebutuhan 3 daerah pilot, pada prinsipnya sama. Namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Banda Aceh misalnya terkesan belum terbiasa melakukan koordinasi internal (Dinas Sosial) dan lintas sector. Koordinasi lintas sector justru lebih banyak dilakukan Dinas P3AKB. Sehingga dibutuhkan penguatan internal dan integrasi sekaligus. Ditambah lagi Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi yang sering menjadi muara permasalahan sosial. Apalagi selama ini Banda Aceh selalu seperti mendapat dukungan penuh dari Propinsi karena banyak kasus di Banda Aceh yang ditangani oleh Propinsi.</p> <p>Aceh Barat, mulai sering melakukan pertemuan lintas sector sehingga PKSAl diharapkan lebih memperkuat sinergisasi yang mulai terbangun.</p> <p>Lhokseumawe, dengan kondisi kota yang kecil namun menampung banyak kasus dari kabupaten tetangga, mengharuskan koordinasi yang kuat, selain internal dan lintas sector juga lintas kabupaten.</p>
<b>Catatan Penting</b>	Seluruh peserta dan lintas sector, masih menganggap bahwa PKSAl adalah kelembagaan baru. Padahal sebenarnya bukan kelembagaan baru. Sekretariat dan Tim yang dibentuk lebih merupakan upaya memperkuat program.
<b>Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)</b>	Lintas sector semua jenjang seperti Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal, dll.
<b>Kendala/tantangan yang dihadapi</b>	Kendala berarti tidak ditemui, hanya kendala terkait lokasi kegiatan yang sangat terbatas terutama di kabupaten/kota
<b>Kesimpulan</b>	Kegiatan terlaksana dengan baik namun masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk penguatan.
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pertemuan rutin lanjutan</li> <li>2. Konsultasi Draft SOP PKSAl</li> <li>3. Konsultasi Draft Action Plan</li> <li>4. Persiapan Regulasi yang diminta Kepala Daerah.</li> </ol>
	<p>Banda Aceh, Oktober 2020 Program Manager</p>  <p><b>Dr. Mahmuddin</b></p> 

**LAPORAN KEGIATAN PKSAI  
KEMENSOS – Dinsos Aceh – PKPM – UNICEF**

<b>Program/Project</b>	Strengthening Integrated Child Social Welfare Service/Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi (PKSAI) in Aceh.													
<b>OUT PUT</b>	2. Government of Aceh province has commitment to establish UK PKSAI Province and District / City PKSAI													
<b>Nama Kegiatan</b>	2.1. Regular Meeting Coordination at UK PKSAI/PKSAI <b>2.1.2. Regular Meeting Coordination PKSAI, in 3 Districts (BANDA ACEH)</b>													
<b>Indikator</b>	2.1. The availability of Decree of The Head of Department of Social Affairs of Aceh Province (Y/N) 2.2. The availability of monthly meeting as mechanism for cross-sectoral and integrated collaboration between UK PKSAI and all intervened district's PKSAIs													
<b>Nomor Acuan Pengiriman Dana</b>	- PCA Ref. No. 2019/33/CP/PKPM - PD Ref. No. 2019/33/CP/PKPM/168													
<b>Jumlah Anggaran Terpakai</b>	Rp. 32.650.000.-													
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalannya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan.</li> <li>3. Penyusunan Draft Rencana Aksi dan SOP startegis pengembangan program PKSAI.</li> </ol>													
<b>Output/Keluaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/kota.</li> <li>2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan.</li> <li>3. Tersusunnya Draft Rencana Aksi dan SOP strategis pengembangan program PKSAI.</li> </ol>													
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat)</b>  <b>Jumlah Peserta (Laki-laki dan Perempuan)</b>	<p><b>BANDA ACEH</b></p> <p><b>Reg Meet 1</b>            Hari/Tanggal : Selasa/22 September 2020            Pukul : 09.00 sampai selesai            Lokasi : Aula Rumah Singgah Dinsos Banda Aceh            Peserta : PSKS Dinsos Aceh</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Peserta</th> </tr> <tr> <th>Laki-laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Regular Meeting 1 Banda Aceh</b></td> <td>24</td> <td>13</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>			Kegiatan	Peserta			Laki-laki	Perempuan	Total	<b>Regular Meeting 1 Banda Aceh</b>	24	13	37
Kegiatan	Peserta													
	Laki-laki	Perempuan	Total											
<b>Regular Meeting 1 Banda Aceh</b>	24	13	37											

<b>Proses Kegiatan</b>	<b>Regular Meeting 1</b>
<b>Pembelajaran</b>	<p>Kebutuhan 3 daerah pilot, pada prinsipnya sama. Namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Banda Aceh misalnya terkesan belum terbiasa melakukan koordinasi internal (Dinas Sosial) dan lintas sector. Koordinasi lintas sector justru lebih banyak dilakukan Dinas P3AKB. Sehingga dibutuhkan penguatan internal dan integrasi sekaligus. Ditambah lagi Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi yang sering menjadi muara permasalahan sosial. Apalagi selama ini Banda Aceh selalu seperti mendapat dukungan penuh dari Propinsi karena banyak kasus di Banda Aceh yang ditangani oleh Propinsi.</p> <p>Aceh Barat, mulai sering melakukan pertemuan lintas sector sehingga PKSAl diharapkan lebih memperkuat sinergisasi yang mulai terbangun.</p> <p>Lhokseumawe, dengan kondisi kota yang kecil namun menampung banyak kasus dari kabupaten tetangga, mengharuskan koordinasi yang kuat, selain internal dan lintas sector juga lintas kabupaten.</p>
<b>Catatan Penting</b>	Seluruh peserta dan lintas sector, masih menganggap bahwa PKSAl adalah kelembagaan baru. Padahal sebenarnya bukan kelembagaan baru. Sekretariat dan Tim yang dibentuk lebih merupakan upaya memperkuat program.
<b>Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)</b>	Lintas sector semua jenjang seperti Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal, dll.
<b>Kendala/tantangan yang dihadapi</b>	Kendala berarti tidak ditemui, hanya kendala terkait lokasi kegiatan yang sangat terbatas terutama di kabupaten/kota
<b>Kesimpulan</b>	Kegiatan terlaksana dengan baik namun masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk penguatan.
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pertemuan rutin lanjutan</li> <li>2. Konsultasi Draft SOP PKSAl</li> <li>3. Konsultasi Draft Action Plan</li> <li>4. Persiapan Regulasi yang diminta Kepala Daerah.</li> </ol>
	<p>Banda Aceh, Oktober 2020  Program Manager  DR. Mahmuddin</p>

**LAPORAN KEGIATAN PKSAI  
KEMENSOS – Dinsos Aceh – PKPM – UNICEF**

<b>Program/Project</b>	Strengthening Integrated Child Social Welfare Service/Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi (PKSAI) in Aceh.											
<b>OUT PUT</b>	2. Government of Aceh province has commitment to establish UK PKSAI Province and District / City PKSAI											
<b>Nama Kegiatan</b>	2.1. Regular Meeting Coordination at UK PKSAI/PKSAI <b>2.1.2. Regular Meeting Coordination PKSAI, in 3 Districts (LHOKSEUMAWE)</b>											
<b>Indikator</b>	2.1. The availability of Decree of The Head of Department of Social Affairs of Aceh Province (Y/N) 2.2. The availability of monthly meeting as mechanism for cross-sectoral and integrated collaboration between UK PKSAI and all intervened district's PKSAIs											
<b>Nomor Acuan Pengiriman Dana</b>	- PCA Ref. No. 2016/33/CP/PKPM - PD Ref. No. 2016/33/CP/PKPM/168											
<b>Jumlah Anggaran Terpakai</b>	Rp. 32.650.000.-											
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	1. Terjalinnnya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Penyusunan Draft Rencana Aksi dan SOP startegis pengembangan program PKSAI.											
<b>Output/Keluaran</b>	1. Terbangunnya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Tersusunnya Draft Rencana Aksi dan SOP strategis pengembangan program PKSAI.											
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat)</b>  <b>Jumlah Peserta (Laki-laki dan Perempuan)</b>	<b>LHOKSEUMAWE</b>  <b>Reg Meet 1</b> Hari/Tanggal. : Rabu, 14 Oktober 2020 Pukul : 14.00 s,d selesai Lokasi : Aula Dinsos Kota Lhokseumawe Peserta : Lintas sector: Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil,Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal.  <table border="1" data-bbox="448 1709 1286 1899"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Peserta</th> </tr> <tr> <th>Laki-laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regular Meeting 1</td> <td>24</td> <td>13</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>	Kegiatan	Peserta			Laki-laki	Perempuan	Total	Regular Meeting 1	24	13	37
Kegiatan	Peserta											
	Laki-laki	Perempuan	Total									
Regular Meeting 1	24	13	37									

<b>Proses Kegiatan</b>	<b>Regular Meeting 1</b>
<b>Pembelajaran</b>	<p>Kebutuhan 3 daerah pilot, pada prinsipnya sama. Namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Banda Aceh misalnya terkesan belum terbiasa melakukan koordinasi internal (Dinas Sosial) dan lintas sector. Koordinasi lintas sector justru lebih banyak dilakukan Dinas P3AKB. Sehingga dibutuhkan penguatan internal dan integrasi sekaligus. Ditambah lagi Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi yang sering menjadi muara permasalahan sosial. Apalagi selama ini Banda Aceh selalu seperti mendapat dukungan penuh dari Propinsi karena banyak kasus di Banda Aceh yang ditangani oleh Propinsi.</p> <p>Aceh Barat, mulai sering melakukan pertemuan lintas sector sehingga PKSAl diharapkan lebih memperkuat sinergisasi yang mulai terbangun.</p> <p>Lhokseumawe, dengan kondisi kota yang kecil namun menampung banyak kasus dari kabupaten tetangga, mengharuskan koordinasi yang kuat, selain internal dan lintas sector juga lintas kabupaten.</p>
<b>Catatan Penting</b>	Seluruh peserta dan lintas sector, masih menganggap bahwa PKSAl adalah kelembagaan baru. Padahal sebenarnya bukan kelembagaan baru. Sekretariat dan Tim yang dibentuk lebih merupakan upaya memperkuat program.
<b>Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)</b>	Lintas sector semua jenjang seperti Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal, dll.
<b>Kendala/tantangan yang dihadapi</b>	Kendala berarti tidak ditemui, hanya kendala terkait lokasi kegiatan yang sangat terbatas terutama di kabupaten/kota
<b>Kesimpulan</b>	Kegiatan terlaksana dengan baik namun masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk penguatan.
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pertemuan rutin lanjutan</li> <li>2. Konsultasi Draft SOP PKSAl</li> <li>3. Konsultasi Draft Action Plan</li> <li>4. Persiapan Regulasi yang diminta Kepala Daerah.</li> </ol>
	<p>Banda Aceh, Oktober 2020  Program Manager    DR. Mahmuddin</p>

**LAPORAN KEGIATAN PKSAI**  
**KEMENSOS – Dinsos Aceh – PKPM – UNICEF**

<b>Program/Project</b>	Strengthening Integrated Child Social Welfare Service/Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi (PKSAI) in Aceh.													
<b>OUT PUT</b>	3. Government of Aceh province is able to improve working mechanism between UK PKSAI of Aceh Province and District / City PKSAI													
<b>Nama Kegiatan</b>	3.1. Development of Work Mechanism/SOP and Monitoring Evaluation Tools on PKSAI													
	<b>3.1.1. Meeting on SOP Development of PKSAI, Conducted in Banda Aceh</b>													
<b>Indikator</b>	3.1. The availability of ratified Standard Operation Procedures on the PKSAI working mechanism between UK PKSAI of Aceh Province and District / City PKSAI, including the CSG (child safeguarding) policy (Y/N)													
	3.2.# of meeting on SOP development of PKSAI at the province (including District's SOPs)													
<b>Nomor Acuan Pengiriman Dana</b>	- PCA Ref. No. 2016/33/CP/PKPM - PD Ref. No. 2016/33/CP/PKPM/168													
<b>Jumlah Anggaran Terpakai</b>	Rp. 9.900.000.-													
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalannya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan.</li> <li>3. Penyusunan Draft Rencana Aksi dan SOP startegis pengembangan program PKSAI.</li> </ol>													
<b>Output/Keluaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/kota.</li> <li>2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan.</li> <li>3. Tersusunnya Draft Rencana Aksi dan SOP strategis pengembangan program PKSAI.</li> </ol>													
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat)</b>	<b>Meeting on SOP 1</b> Hari/Tanggal : Jum'at/25 September 2020 Pukul : 14.00 sampai selesai Lokasi : Ruang Rapat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh Peserta : Lintas sector Perlindungan Anak dan Media Massa/Online													
<b>Jumlah Peserta (Laki-laki dan Perempuan)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Peserta</th> </tr> <tr> <th>Laki-laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Meeting on SOP 1</b></td> <td>24</td> <td>13</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>			Kegiatan	Peserta			Laki-laki	Perempuan	Total	<b>Meeting on SOP 1</b>	24	13	37
Kegiatan	Peserta													
	Laki-laki	Perempuan	Total											
<b>Meeting on SOP 1</b>	24	13	37											

<b>Pembelajaran</b>	<p>Kebutuhan 3 daerah pilot, pada prinsipnya sama. Namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Banda Aceh misalnya terkesan belum terbiasa melakukan koordinasi internal (Dinas Sosial) dan lintas sector. Koordinasi lintas sector justru lebih banyak dilakukan Dinas P3AKB. Sehingga dibutuhkan penguatan internal dan integrasi sekaligus. Ditambah lagi Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi yang sering menjadi muara permasalahan sosial. Apalagi selama ini Banda Aceh selalu seperti mendapat dukungan penuh dari Propinsi karena banyak kasus di Banda Aceh yang ditangani oleh Propinsi.</p> <p>Aceh Barat, mulai sering melakukan pertemuan lintas sector sehingga PKSAI diharapkan lebih memperkuat sinergisasi yang mulai terbangun.</p> <p>Lhokseumawe, dengan kondisi kota yang kecil namun menampung banyak kasus dari kabupaten tetangga, mengharuskan koordinasi yang kuat, selain internal dan lintas sector juga lintas kabupaten.</p>
---------------------	--

<b>Catatan Penting</b>	Seluruh peserta dan lintas sector, masih menganggap bahwa PKSAI adalah kelembagaan baru. Padahal sebenarnya bukan kelembagaan baru. Sekretariat dan Tim yang dibentuk lebih merupakan upaya memperkuat program.
<b>Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)</b>	Lintas sector semua jenjang seperti Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal, dll.
<b>Kendala/tantangan yang dihadapi</b>	Kendala berarti tidak ditemui, hanya kendala terkait lokasi kegiatan yang sangat terbatas terutama di kabupaten/kota
<b>Kesimpulan</b>	Kegiatan terlaksana dengan baik namun masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk penguatan.
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pertemuan rutin lanjutan</li> <li>2. Konsultasi Draft SOP PKSAI</li> <li>3. Konsultasi Draft Action Plan</li> <li>4. Persiapan Regulasi yang diminta Kepala Daerah.</li> </ol>
	<p>Banda Aceh, Oktober 2020  Program Manager  DR. Mahmuddin</p>

**LAPORAN KEGIATAN PKSAI  
KEMENSOS – Dinsos Aceh – PKPM – UNICEF**

<b>Program/Project</b>	Strengthening Integrated Child Social Welfare Service/Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi (PKSAI) in Aceh.											
<b>OUT PUT</b>	2. Government of Aceh province has commitment to establish UK PKSAI Province and District / City PKSAI											
<b>Nama Kegiatan</b>	2.1. Regular Meeting Coordination at UK PKSAI/PKSAI <b>2.1.2. Regular Meeting Coordination PKSAI, in 3 Districts (LHOKSEUMAWE)</b>											
<b>Indikator</b>	2.1. The availability of Decree of The Head of Department of Social Affairs of Aceh Province (Y/N) 2.2. The availability of monthly meeting as mechanism for cross-sectoral and integrated collaboration between UK PKSAI and all intervened district's PKSAIs											
<b>Nomor Acuan Pengiriman Dana</b>	- PCA Ref. No. 2016/33/CP/PKPM - PD Ref. No. 2016/33/CP/PKPM/168											
<b>Jumlah Anggaran Terpakai</b>	Rp. 32.650.000.-											
<b>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</b>	1. Terjalannya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Penyusunan Draft Rencana Aksi dan SOP startegis pengembangan program PKSAI.											
<b>Output/Keluaran</b>	1. Terbangunnya koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan penguatan program PKSAI di tingkat Kabupaten/kota. 2. Penguatan komitmen lintas sektor dalam membangun mekanisme program perlindungan anak melalui PKSAI secara berkelanjutan. 3. Tersusunnya Draft Rencana Aksi dan SOP strategis pengembangan program PKSAI.											
<b>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat)</b>  <b>Jumlah Peserta (Laki-laki dan Perempuan)</b>	<b>LHOKSEUMAWE</b>  <b>Reg Meet 1</b> Hari/Tanggal. : Selasa, 20 Oktober 2020 Pukul : 9.30 s.d selesai Lokasi : Aula Dinsos Kota Lhokseumawe Peserta : Lintas sector: Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Peserta</th> </tr> <tr> <th>Laki-laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Regular Meeting 1</b></td> <td>24</td> <td>13</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>	Kegiatan	Peserta			Laki-laki	Perempuan	Total	<b>Regular Meeting 1</b>	24	13	37
Kegiatan	Peserta											
	Laki-laki	Perempuan	Total									
<b>Regular Meeting 1</b>	24	13	37									

<b>Proses Kegiatan</b>	<b>Regular Meeting 1</b>
<b>Pembelajaran</b>	<p>Kebutuhan 3 daerah pilot, pada prinsipnya sama. Namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mungkin disatukan. Banda Aceh misalnya terkesan belum terbiasa melakukan koordinasi internal (Dinas Sosial) dan lintas sector. Koordinasi lintas sector justru lebih banyak dilakukan Dinas P3AKB. Sehingga dibutuhkan penguatan internal dan integrasi sekaligus. Ditambah lagi Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi yang sering menjadi muara permasalahan sosial. Apalagi selama ini Banda Aceh selalu seperti mendapat dukungan penuh dari Propinsi karena banyak kasus di Banda Aceh yang ditangani oleh Propinsi.</p> <p>Aceh Barat, mulai sering melakukan pertemuan lintas sector sehingga PKSAL diharapkan lebih memperkuat sinergisasi yang mulai terbangun.</p> <p>Lhokseumawe, dengan kondisi kota yang kecil namun menampung banyak kasus dari kabupaten tetangga, mengharuskan koordinasi yang kuat, selain internal dan lintas sector juga lintas kabupaten.</p>
<b>Catatan Penting</b>	Seluruh peserta dan lintas sector, masih menganggap bahwa PKSAL adalah kelembagaan baru. Padahal sebenarnya bukan kelembagaan baru. Sekretariat dan Tim yang dibentuk lebih merupakan upaya memperkuat program.
<b>Para Pihak yang Terlibat (actor kunci)</b>	Lintas sector semua jenjang seperti Dinas Sosial, Dinas P3A, Polisi, Disdukcapil, Dinkes, P2TP2A, Sakti Peksos, Bappeda, Baitul Mal, dll.
<b>Kendala/tantangan yang dihadapi</b>	Kendala berarti tidak ditemui, hanya kendala terkait lokasi kegiatan yang sangat terbatas terutama di kabupaten/kota
<b>Kesimpulan</b>	Kegiatan terlaksana dengan baik namun masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk penguatan.
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan pertemuan rutin lanjutan</li> <li>2. Konsultasi Draft SOP PKSAL</li> <li>3. Konsultasi Draft Action Plan</li> <li>4. Persiapan Regulasi yang diminta Kepala Daerah.</li> </ol>
	<p>Banda Aceh, Oktober 2020 Program Manager</p>  <p><b>PKPM</b> Dr. Mahmuiddin</p>